

## **Peran Inspektorat Daerah Sebagai *Watch Dog*, Konsultan dan Katalis (Studi pada Pemerintah Kota Salatiga)**

Mita Kristiyani

Program Studi S1 Akuntansi  
Universitas Kristen Satya Wacana  
Salatiga, Indonesia

e-mail: mitakristiyani09@gmail.com

### **Abstrak**

Tugas pengawasan inspektorat sebagai audit internal yang pada awalnya berperan sebagai 'watchdog' yaitu mencari kesalahan dan kini telah berperan sebagai konsultan dan katalis. Tujuan penelitian adalah: untuk mengetahui bagaimana peran audit internal dalam inspektorat sebagai *watch dog*, konsultan dan katalis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang ditambah secara kualitatif dengan objek auditor di inspektorat di Inspektorat Kota Salatiga sebanyak 15 orang. Jenis data menggunakan data primer yang diperoleh dengan penyebaran angket dan wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan peran Inspektorat sebagai *watchdog* terutama mengawasi kepatuhan auditee terhadap standar operasional yang ada, melakukan inspeksi terhadap kepatuhan karyawan pada peraturan dan kebijakan yang ditetapkan dan melakukan penghitungan ulang terhadap catatan angka-angka dan transaksi-transaksi yang terdapat dalam laporan keuangan. Peran Inspektorat sebagai konsultan terutama menganalisis semua tindakan pegawai OPD agar tidak bertentangan dengan kebijakan, standar, prosedur, hukum, dan regulasi yang berlaku dan mengevaluasi program dan kegiatan operasi apakah telah berfungsi sebagaimana mestinya dan memberi hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Peran Inspektorat sebagai katalis terutama melakukan evaluasi bersama auditee mengenai laporan keuangan yang telah di review.

**Kata kunci:** Peran inspektorat (*watchdog*, konsultan, katalis)

### **Abstract**

*The task of supervising the inspectorate as an internal audit which initially played the role of a 'watchdog' is finding fault and now has a role as a consultant and catalyst. The research objectives are: to determine how the role of internal audit in the inspectorate as a watch dog, consultant and catalyst. This research is a qualitative study in which the research method used is a qualitative research method which is added qualitatively with the auditor objects in the inspectorate in the Salatiga City Inspectorate of 15 people. This type of data uses primary data obtained by distributing questionnaires and interviews. Data analysis techniques in this research are descriptive quantitative and qualitative. Research results show the role of the Inspectorate as a watchdog, especially overseeing auditee compliance with existing operational standards, conducting inspections of employee compliance with established regulations and policies and recalculating records of figures and transactions contained in financial statements. The role of the Inspectorate as a consultant is primarily to analyze all actions of OPD employees so that they do not conflict with policies, standards, procedures, laws and regulations and evaluate whether programs and operational activities are functioning properly and produce results that are in accordance with planned goals and objectives. The role of the Inspectorate as a catalyst is primarily to evaluate with the auditee the reviewed financial statements.*

**Keywords:** *The role of the inspectorate (watchdog, consultant, catalyst)*

## PENDAHULUAN

Unsur pengawasan keuangan daerah adalah salah satu hal yang terpenting guna menjaga kinerja OPD. Tugas pengawasan tersebut dilakukan oleh inspektorat daerah (Sanjaya, 2016). Inspektorat daerah dalam hal ini bertugas sebagai auditor internal dari OPD dengan sebutan sebagai Aparat Pengendalian Intern Pemerintah (APIP) (Sanjaya, 2016).

Tugas pengawasan inspektorat sebagai audit internal yang pada awalnya berperan sebagai *'watchdog'* yaitu mencari kesalahan dan kini telah berperan sebagai konsultan dan katalis (Nurfa, 2017). Hal tersebut seperti yang didefinisikan oleh *The Institute of Internal Auditor* (2001), audit internal merupakan aktivitas independen yang merancang dan menetapkan tujuan serta konsultasi yang dapat menciptakan nilai tambah serta meningkatkan kinerja organisasi (Susilawati, 2014). Dengan demikian inspektorat sebagai audit internal membantu OPD dalam mencapai tujuan dengan pendekatan terarah serta sistematis dalam menilai, mengevaluasi kinerja OPD.

Peran inspektorat sebagai konsultan memberikan manfaat seperti nasehat kepada kepala OPD dalam mengelola keuangan daerah (Zein, 2011). Selain itu peran inspektorat sebagai katalis sebagai pembimbing dan memberikan arahan bagi OPD supaya dapat mencapai tujuan organisasi (Rahayu et al., 2017).

Peran inspektorat sebagai didukung oleh seperti kompetensi, biaya audit, serta kewenangan (Khoiro, Marsyad, & K. Hidayati, 2017). Menurut AAIPI (2013) menjelaskan para auditor internal yang berada di satuan kerja inspektorat dibekali dengan pendidikan, keahlian dan pengetahuan, serta ketrampilan selain itu didukung dengan pengalaman.

Guna mendukung tugas inspektorat sebagai pengawas tertuang dalam Surat Edaran Menteri. Dalam Negeri Nomor 900/2900/SJ/2008 mengenai prioritas pemberian anggaran guna meningkatkan tugas serta fungsi inspektorat. Intinya adalah, pemerintah daerah menyediakan alokasi dana guna mendukung kegiatan inspektorat dalam melakukan pengawasan internal pemerintah dalam hal ini berperan sebagai audit internal pemerintah. Anggaran tersebut sebesar 1 % dan maksimal adalah 1,5 % yang diambil dari APBD daerah (Saerang, Karamoy, & Siwy, 2008)

Penelitian-penelitian tentang peran audit internal pada pemerintah daerah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, seperti: Nurfa (2017) yang meneliti faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran audit internal yang dipengaruhi seperti faktor biaya audit, kompetensi, kewenangan.

Penelitian sebelumnya, pada dasarnya merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis *explanatory research*, sehingga hasil penelitian-penelitian tersebut hanya sebatas membuktikan secara empiris faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran audit internal. Oleh sebab itu, untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan scoring yang ditambah dengan jenis deskriptif kualitatif. melalui penelitian ini akan lebih dapat diungkapkan secara kongkrit fakta-fakta sebenarnya tentang peran audit internal khususnya di inspektorat Salatiga. Peneliti akan mengambil objek OPD kota Salatiga karena Kota Salatiga pada tahun 2016 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) (<http://salatiga.go.id/salatiga-raih-wtp/>). Selain itu, kota salatiga merupakan kota yang sedang berkembang, namun dari aspek kinerjanya belum menunjukkan kota administrative

Persoalan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana peran inspektorat selaku auditor internal (*watch dog*, konsultan dan katalis) di dalam pemerintahan daerah?. Tujuan penelitian adalah: untuk mengetahui bagaimana peran audit internal dalam inspektorat sebagai *watch dog*, konsultan dan katalis.

Manfaat penelitian sebagai bahan evaluasi inspektorat guna meningkatkan kinerja dalam menjalankan peran sebagai *watchdog* dan konsultan serta katalis. Penelitian juga digunakan sebagai evaluasi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung peran inspektorat daerah sebagai *watch dog* dan konsultan serta katalis. Penelitian bermanfaat sebagai referensi AAIPi dalam merumuskan pedoman, standar serta regulasi yang terkait dengan peran inspektorat sebagai *watch dog* dan konsultan serta katalis.

### **Audit Internal**

Definisi Audit Internal menurut *The Institute of Internal Auditors* (2011) merupakan aktifitas independen yang memberikan jaminan objektif serta konsultasi guna memberikan nilai tambah serta meningkatkan kinerja organisasi. Sedangkan menurut (Susilawati, 2014), audit internal adalah suatu peran penilaian yang dikembangkan secara bebas dan tidak terbatas, seorang profesional yang melakukan peran penilaian tersebut harus memiliki pemahaman, pengetahuan, dan keahlian yang mendalam kegiatan organisasi dan keefektifan dan efisiensi tujuan

organisasi (Susilawati, 2014). Audit internal di pemerintah daerah sendiri berperan sebagai pencegah terjadinya kecurangan internal dan sebagai pengaudit setiap dinas atau kantor pemerintah daerah.

### **Peran Audit Internal**

Peran auditor internal sebagai *watchdog* berguna sebagai pengawas semua kebijakan yang akan dilaksanakan oleh organisasi (Tampubolon, 2005). Kunci dari audit internal sebagai pengawas jika terjadi penyimpangan, kesalahan dan keterlambatan jangka pendek yang perlu dikoreksi, inspeksi, perhitungan, pengecekan, observasi serta memberikan saran atau rekomendasi (Rahayu et al., 2017).

Sebagai konsultan, peran auditor internal yaitu melayani klien dengan baik dan mendukung kepentingan klien dengan tetap mempertahankan loyalitasnya (Tampubolon, 2005). Auditor internal memiliki peran sebagai pemeriksa sekaligus berperan sebagai mitra manajemen. Auditor sebagai konsultan berperan meningkatkan pengetahuan yang dimiliki terkait dengan profesi sebagai auditor serta dapat membantu organisasi dalam mengatasi terjadinya masalah (Supriyanto, 2009). Berdasarkan hal tersebut untuk peran auditor internal sebagai konsultan yaitu membantu penanganan masalah yang dihadapi organisasi guna mencapai kinerja organisasi yang lebih baik (Tusek et al., 2016).

Peran auditor internal sebagai katalisator bertindak sebagai fasilitator (Suroso, 2009). Auditor internal sebagai katalisator terlibat aktif dalam melakukan penilaian risiko yang terdapat dalam proses bisnis organisasi. Auditor internal memerlukan sikap proaktif dalam mengenali risiko-risiko yang dihadapi

atau mungkin dihadapi manajemen dalam pencapaian tujuan organisasi.

### **Inspektorat Sebagai Audit Internal Pemerintahan**

Berdasarkan PP No.60 tahun 2008 mengenai peran inspektorat, inspektorat memiliki kedudukan sebagai perencana serta mencapai visi dan misi. Selain itu inpektorat berperan sebagai pengawas pelaksanaan program anggaran belanja OPD (Astuty, 2007). Salah satu misi yang dicapai inspektorat adalah mencegah penyimpangan anggaran. Berdasarkan hal tersebut, intinya adalah inspektorat salah satu bagian APIP.

Landasan hukum Penyusunan rencana Strategis Inspektorat Kota Salatiga, seperti: 1) PP No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, pengendalian dan tata cara serta melakukan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan termuat dalam Keputusan.Walikota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan fungsi Inspektorat Kota Salatiga. Inspektorat Kota Salatiga sebagai salah satu lembaga pengawas intern pemerintah mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah (Renstra Kota Salatiga 20011-2016).

Inspektorat Salatiga berperan melakukan pengawasan OPD Salatiga yang terdiri dari inspektorat melakukan monitoring, audit dan mengevaluasi program kerja tiap tahunan disetiap OPD. Pengawasan tahunan melingkupi melakukan pemeriksaan khusus pelaksanaan anggaran belanja daerah di setiap OPD Salatiga serta melakukan audit terhadap laporan kinerja OPD (LKIP) kota Salatiga. Inspektorat kota Salatiga juga memiliki

peran dalam mereview terhadap laporan keuangan daerah dan rencana kerja (RPJMD Kota Salatiga Tahun 20011 – 2016)

### **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan kualitatif dimana metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan objek auditor di inspektorat di Inspektorat Kota Salatiga.

Populasi penelitian ini adalah pegawai inspektorat kota Salatiga yang bertugas sebagai auditor berjumlah 15 pegawai. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan saturation sampel, yaitu teknik pengambilan sampel dengan semua jumlah populasi dijadikan sampel. Berdasarkan teknik tersebut maka jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 15 pegawai.

Satuan pengamatan (*unit of observation*) adalah hasil amatan yang dijadikan sumber untuk memperoleh data dalam rangka menggambarkan atau menjelaskan tentang satuan analisis (Ihalauw, 2003). Dalam penelitian ini yang menjadi satuan analisis penelitian ini adalah peran inspektorat daerah sebagai *watch dog*, konsultan dan katalis. Untuk satuan analisis adalah auditor di Inspektorat Salatiga.

Data menggunakan data primer yang diperoleh dengan penyebaran angket terhadap auditor di inspektorat Salatiga. Selain itu penelitian ini juga melakukan wawancara terhadap salah satu auditor Inspektorat Salatiga.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif penelitian ini akan menggunakan scoring, adapun langkahnya sebagai berikut:

1 = Sangat Tidak Setuju

- 2 = Tidak Setuju
- 3 = Netral
- 4 = Setuju
- 5 = Sangat Setuju

Nilai interval untuk watchdog, katalis dan konsultan dengan

menggunakan statistik deskriptif dengan rumus sebagai berikut,

$$I = \frac{5-1}{5} = 0,8$$

Sehingga menghasilkan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 1. Interval

No	Interval	Kriteria
1	1.00-1.80	Sangat Tidak Setuju
2	1.81-2.60	Tidak Setuju
3	2.61-3.40	Netral
4	3.41-4.20	Setuju
5	4.21-5.00	Sangat Setuju

Sedangkan secara kualitatif, dilakukan dengan wawancara terhadap pimpinan maupun beberapa pegawai inspektorat.

## HASIL PENELITIAN

### Profil Responden

Berikut tabel yang menyajikan profil responden pegawai inspektorat yang bekerja sebagai auditor berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir dan lama bekerja

Tabel 2. Profil Responden

Profil Responden	Jumlah	Prosentase
<b>Jenis Kelamin</b>		
Laki-laki	9	60.00%
Perempuan	6	40.00%
Total	15	100.00%
<b>Usia</b>		
Usia 20 - 30 tahun	3	20.00%
Usia 31 - 40 tahun	7	46.67%
Diatas 40 tahun	5	33.33%
Total	15	100.00%
<b>Pendidikan Terakhir</b>		
Diploma	1	6.67%
S1	9	60.00%
S2	5	33.33%
S3	0	0.00%
Total	15	100.00%
<b>Lama Bekerja</b>		
1 tahun - tiga tahun	7	46.67%
4 tahun - 6 tahun	6	40.00%
Diatas 6 tahun	2	13.33%
Total	15	100.00%

Tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa, kebanyakan auditor di

inspektorat adalah laki-laki sebanyak 9 orang dengan usia antara 31 sampai

40 tahun sebanyak 7 orang. jika dilihat tingkat pendidikan sebagian besar lulusan sarjana (S1) sebanyak 9 rang dan sebagian besar telah bekerja selama 1 sampai tiga tahun sebanyak 7 orang.

### Peran Auditor Internal Sebagai *Watchdog*

Tabel berikut menyajikan rata-rata peran auditor internal sebagai *watchdog*

Tabel 3. Peran Auditor Internal Sebagai Watchdog

No	Peran Auditor Internal Sebagai <i>Watchdog</i>	STS	TS	N	S	SS	Rata-rata	Kategori
1	Inspektorat telah berperan sebagai mata dan telinga kepala daerah	0	0	3	8	4	4.067	Setuju
2	Inspektorat selalu melakukan pengawasan terhadap setiap dokumen OPD	0	1	4	6	3	3.867	Setuju
3	Inspektorat selalu mengawasi kepatuhan auditee terhadap standar operasional yang ada	0	0	2	9	4	4.133	Setuju
4	Inspektorat mencari kelemahan atau kesalahan pihak yang diaudit	0	1	2	11	1	3.800	Setuju
5	Inspektorat melakukan inspeksi secara mendadak pada setiap OPD	0	2	4	7	2	3.600	Setuju
6	Inspektorat melakukan inspeksi terhadap kepatuhan karyawan pada peraturan dan kebijakan yang ditetapkan	0	0	2	9	4	4.133	Setuju
7	Inspektorat melakukan penghitungan fisik terhadap uang kas.	0	2	0	8	5	4.067	Setuju
8	Inspektorat melakukan penghitungan ulang terhadap catatan angka-angka dan transaksi yang terdapat dalam laporan keuangan.	0	0	2	9	4	4.133	Setuju
9	Inspektorat bertugas mencocokkan data (catatan) transaksi dengan bukti-bukti.	0	2	3	6	4	3.800	Setuju
10	Inspektorat meninjau kesesuaian pelaksanaan program terhadap program yang direncanakan	1	1	4	7	2	3.533	Setuju
Total Rata-rata							3.913	Setuju

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa, peran inspektorat kota Salatiga berdasarkan persepsi pegawai inspektorat terutama bagian auditor dengan nilai rata-rata sebesar 3,913. Indikator *watchdog* dengan nilai diatas rata-rata seperti Inspektorat telah berperan sebagai mata dan telinga kepala daerah sebesar 4,067, Inspektorat selalu mengawasi kepatuhan auditee terhadap standar operasional yang ada sebesar 4,133, Inspektorat melakukan inspeksi terhadap kepatuhan karyawan pada peraturan dan kebijakan yang ditetapkan sebesar 4,133, Inspektorat melakukan penghitungan fisik terhadap uang kas sebesar 4,067 dan Inspektorat melakukan penghitungan ulang terhadap catatan angka-angka dan transaksi-transaksi yang terdapat dalam laporan keuangan sebesar 4,133. Sedangkan nilai rata-rata

terendah dari indikator *watchdog* adalah Inspektorat meninjau kesesuaian pelaksanaan program terhadap program yang direncanakan sebesar 3,533. Berdasarkan Tabel 3, diperoleh nilai tertinggi sebesar 4,133 terdapat tiga indikator dengan nilai sama. Hal ini bebrarti bahwa Auditor setuju jika peran utama auditor sebagai *watchdog* adalah inspektorat mengawasi kepatuhan auditee terhadap standar operasional yang ada dan melakukan inspeksi terhadap kepatuhan karyawan pada peraturan dan kebijakan yang ditetapkan serta melakukan inspeksi terhadap kepatuhan karyawan pada peraturan dan kebijakan yang ditetapkan.

#### **Peran Auditor Internal Sebagai Konsultan**

Tabel berikut menyajikan rata-rata peran auditor internal sebagai *konsultan*

Tabel 4. Peran Auditor Internal Sebagai Konsultan

No	Peran Auditor Internal Sebagai <i>Konsultan</i>	STS	TS	N	S	SS	Rata-rata	Kategori
1	Inspektorat memberikan rekomendasi untuk setiap masalah yang terjadi di dalam kegiatan operasional	0	0	3	9	3	4.000	Setuju
2	Inspektorat memberikan jasa konsultasi serta memberi kontribusi dalam mencapai tujuan penataan dalam pembuatan dokumen anggaran yang baik dan benar pada setiap OPD	0	0	4	8	3	3.933	Setuju
3	Inspektorat melakukan monitoring secara berkesinambungan atas perbaikan sistem dan Standar Prosedur Operasional (SPO)	0	0	2	8	5	4.133	Setuju
4	Inspektorat berkonsultasi dengan pihak auditee mengenai standar	0	0	4	11	0	3.733	Setuju

5	operasional penataan serta pembuatan dokumen yang baik dan benar Inspektorat menerima setiap kritikan serta saran yang bersifat profesional dari auditee	0	1	7	4	2	3.600	Setuju
6	Inspektorat menganalisis semua tindakan pegawai OPD agar tidak bertentangan dengan kebijakan, standar, prosedur, hukum, dan regulasi yang berlaku	0	0	2	8	5	4.200	Setuju
7	Inspektorat memberi jasa konsultasi dan memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja OPD.	0	1	1	8	5	4.133	Setuju
8	Inspektorat menganalisis kecukupan dan efektivitas pengendalian internal yang ada sehingga dapat membantu OPD dalam pencapaian tujuan	0	0	3	9	3	4.000	Setuju
9	Inspektorat mengevaluasi program dan kegiatan operasi apakah telah berfungsi sebagaimana mestinya dan memberi hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.	0	0	2	8	5	4.200	Setuju
10	Inspektorat mengevaluasi kesesuaian aktivitas dengan hukum, regulasi, dan standar yang berlaku.	1	0	6	6	2	3.533	Setuju
Total Rata-rata							3.947	Setuju

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa peran inspektorat sebagai konsultan memiliki nilai rata-rata sebesar 3,947. Indikator peran sebagai konsultan dengan nilai diatas rata-rata seperti Inspektorat memberikan rekomendasi untuk setiap masalah yang terjadi di dalam kegiatan operasional sebesar 4,000, Inspektorat melakukan monitoring secara berkesinambungan atas perbaikan sistem dan Standar Prosedur Operarional (SPO sebesar 4,133, Inspektorat menganalisis semua tindakan pegawai OPD agar tidak bertentangan dengan kebijakan,

standar, prosedur, hukum, dan regulasi yang berlaku sebesar 4,200, Inspektorat menganalisis kecukupan dan efektivitas pengendalian internal yang ada sehingga dapat membantu OPD dalam pencapaian tujuan sebesar 4,000, dan Inspektorat mengevaluasi program dan kegiatan operasi apakah telah berfungsi sebagaimana mestinya dan memberi hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan sebesar 4,200. Sedangkan indikator dengan nilai terendah adalah Inspektorat mengevaluasi kesesuaian aktivitas dengan hukum, regulasi, dan



standar yang berlaku. Sebesar 3,533. Berdasarkan tabel 4 juga ditemukan bahwa rata-rata tertinggi dari konsultan sebesar 4,200, yang artinya bahwa auditor setuju jika peran utama inspektorat sebagai konsultan adalah menganalisis semua tindakan pegawai OPD agar tidak bertentangan dengan kebijakan, standar, prosedur, hukum, dan regulasi yang berlaku dan mengevaluasi program dan kegiatan

operasi apakah telah berfungsi sebagaimana mestinya dan memberi hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan

### Peran Auditor Internal Sebagai Katalis

Tabel berikut menyajikan rata-rata peran auditor internal sebagai katalis

Tabel 5. Peran Auditor Internal Sebagai Katalis

No	Peran Auditor Internal Sebagai Katalis	STS	TS	N	S	SS	Rata-rata	Kategori
1	Inspektorat terlibat dalam perencanaan serta pembuatan keputusan strategis di setiap OPD	0	0	4	8	3	3.933	Setuju
2	Inspektorat menganalisis aktivitas tertentu yang mengarah ke arah penyimpangan yang merugikan	0	0	4	8	3	3.800	Setuju
3	Inspektorat melakukan evaluasi bersama auditee mengenai laporan keuangan yang telah di review	0	0	2	8	5	4.200	Setuju
4	Inspektorat melakukan observasi pada setiap OPD untuk melakukan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan	0	0	3	11	1	3.733	Setuju
5	Inspektorat membantu OPD untuk mencapai tujuan penggunaan anggaran yang sesuai dengan standar operasional.	0	1	3	10	1	3.733	Setuju
6	Inspektorat mengarahkan pelaksanaan kualitas manajemen agar sesuai dengan yang direncanakan.	0	0	3	7	5	4.133	Setuju
7	Inspektorat membuat rekomendasi untuk meningkatkan sistem pengendalian operasional organisasi jika diperluka	0	2	3	7	3	3.867	Setuju
8	Inspektorat menentukan efektivitas sistem organisasi yang berkaitan dengan pencatatan	0	0	3	9	3	4.000	Setuju

9	keuangan internal dan pengawasan kerja Inspektorat menentukan kelayakan sistem organisasi yang berkaitan dengan pencatatan keuangan internal dan pengawasan kerja	0	1	2	7	5	4.067	Setuju
10	Inspektorat membantu meningkatkan produktivitas setiap OPD	1	0	7	5	2	3.467	Setuju
Total Rata-rata							3.893	Setuju

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa, peran inspektorat sebagai katalis memiliki rata-rata sebesar 3,893. Indikator dengan nilai diatas rata-rata seperti Inspektorat terlibat dalam perencanaan serta pembuatan keputusan strategis di setiap OPD sebesar 3,933, inspektorat melakukan evaluasi bersama auditee mengenai laporan keuangan yang telah di review sebesar 4,200, inspektorat mengarahkan pelaksanaan kualitas manajemen agar sesuai dengan yang direncanakan sebesar 4,133, inspektorat menentukan efektivitas sistem organisasi yang berkaitan dengan pencatatan keuangan internal dan pengawasan kerja sebesar 4,000 dan inspektorat menentukan kelayakan sistem organisasi yang berkaitan dengan pencatatan keuangan internal dan pengawasan kerja sebesar 4,067. Sedangkan indikator dengan nilai terendah adalah inspektorat membantu meningkatkan produktivitas setiap OPD sebesar 3,467. Jika dilihat dari nilai rata-rata, peran sebagai katalis indikator yang memiliki nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,200, hal ini berarti bahwa auditor setuju jika inspektorat sebagai katalis memiliki peran utama yaitu melakukan evaluasi bersama auditee mengenai laporan keuangan yang telah di review

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, peran auditor di inspektorat Salatiga cenderung ke berperan sebagai *konsultan*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Peran Auditor

No	Peran Auditor	Rata-rata
1	<i>Watchdog</i>	3.913
2	<i>Konsultan</i>	3.947
3	<i>Katalis</i>	3.893

Tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa, peran auditor pada inspektorat Salatiga memiliki kecenderungan berperan sebagai *konsultan* dengan nilai rata-rata tertinggi dibandingkan berperan sebagai *watchdog* dan *katalis*.

Peran inspektorat kota Salatiga berdasarkan persepsi pegawai inspektorat terutama bagian auditor dengan nilai rata-rata sebesar 3,913. yang artinya bahwa auditor setuju dengan pernyataan peran auditor sebagai *watchdog*. Berdasarkan Tabel 3, diperoleh nilai tertinggi sebesar 4,133 terdapat tiga indikator dengan nilai sama. Hal ini berarti bahwa Auditor setuju jika peran utama auditor sebagai *watchdog* adalah inspektorat mengawasi kepatuhan terhadap standar operasional yang ada dan melakukan inspeksi terhadap kepatuhan OPD pada peraturan dan kebijakan yang ditetapkan serta

melakukan inspeksi terhadap kepatuhan OPD pada peraturan dan kebijakan yang ditetapkan. Hasil ini seperti sejalan dengan Yusniyar dkk (2016), yang menemukan peran utama inspektorat sebagai *watchdog* adalah melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan di setiap OPD (Yusniyar dkk, 2016). Seperti yang diungkapkan oleh salah satu auditor menyatakan bahwa:

" Begini mbak, *peran inspektorat sebagai watchdog yaitu melakukan pengawasan terutama pada dokumen keuangan setiap OPD, serta melakukan kebijakan sesuai dengan yang dilakukan setiap OPD serta melakukan pengecekan, perhitungan ulang pada setiap dokumen keuangan OPD. Selain itu peranan watchdog itu sendiri bertujuan untuk memastikan ketaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan. Selama ini OPD Salatiga mematuhi semua aturan yang diberikan oleh inspektorat mengenai pelaporan keuangan, setiap OPD tepat waktu dalam melaporkan semua kegiatan*".

Hasil tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Tampubolon (2005), yang mengungkapkan auditor internal sebagai *watchdog* berguna sebagai pengawas semua kebijakan yang akan dilaksanakan oleh organisasi. Auditor internal sebagai *watchdog* berguna sebagai pengawas semua kebijakan yang akan dilaksanakan oleh organisasi. Hasil ini juga di dukung secara statistic deskriptif dengan peran utama inspektorat adalah berperan sebagai mata dan telinga kepala daerah, inspektorat mengawasi kepatuhan

auditee terhadap standar operasional yang ada, inspektorat mengawasi kepatuhan auditee terhadap standar operasional yang ada, inspektorat melakukan penghitungan fisik terhadap uang kas dan inspektorat melakukan penghitungan ulang terhadap catatan angka-angka dan transaksi-transaksi yang terdapat dalam laporan keuangan.

Peran inspektorat sebagai konsultan memiliki nilai rata-rata sebesar 3,947. Berdasarkan tabel 4 juga ditemukan bahwa rata-rata tertinggi dari konsultan sebesar 4,200, yang artinya bahwa auditor setuju jika peran utama inspektorat sebagai konsultan adalah menganalisis semua tindakan pegawai OPD agar tidak bertentangan dengan kebijakan, standar, prosedur, hukum, dan regulasi yang berlaku dan mengevaluasi program dan kegiatan operasi apakah telah berfungsi sebagaimana mestinya dan memberi hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Hasil ini sesuai dengan Supriyanto (2009) yang mengungkapkan peran inspektorat sebagai *konsultan* adalah melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan di setiap OPD. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu auditor menyatakan bahwa :

" *peran inspektorat sebagai konsultan menurut saya, inspektorat wajib memberikan rekomendasi dan memberikan jasa konsultasi serta melakukan monitoring dalam pembuatan dokumen keuangan seperti anggaran kegiatan yang akan digunakan oleh setiap OPD*". Namun saat ini peran utama inspektorat ya sebagai konsultan ini mbak, terutama mereview RPJMD, RKA dan DPA. Selain itu menurut saya peran auditor sebagai konsultan

*yaitu memberikan manfaat berupa nasehat dalam pengelolaan sumber daya di setiap OPD sehingga dapat membantu pelaporan keuangan setiap OPD dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan”.*

Hasil tersebut berarti bahwa peranan Audit yang dilakukan adalah *operational audit / performance audit*, yaitu meyakinkan bahwa organisasi telah memanfaatkan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif sehingga dapat dinilai apakah manajemen telah menjalankan aktivitas organisasi yang mengarah pada tujuannya. Rekomendasi yang dibuat oleh auditor biasanya bersifat jangka menengah. Tampubolon (2005), auditor internal memiliki peran sebagai pemeriksa sekaligus berperan sebagai mitra manajemen. Auditor sebagai konsultan berperan meningkatkan pengetahuan yang dimiliki terkait dengan profesi sebagai auditor serta dapat membantu organisasi dalam mengatasi terjadinya masalah (Supriyanto, 2009). Hal tersebut dengan didukung hasil statistic deskriptif, yang mana peran utama inspektorat sebagai konsultan seperti inspektorat melakukan monitoring secara berkesinambungan atas perbaikan sistem dan Standar Prosedur Operasional (SPO), inspektorat menganalisis semua tindakan pegawai OPD agar tidak bertentangan dengan kebijakan, standar, prosedur, hukum, dan regulasi yang berlaku, inspektorat menganalisis semua tindakan pegawai OPD agar tidak bertentangan dengan kebijakan, standar, prosedur, hukum, dan regulasi yang berlaku dan inspektorat menganalisis kecukupan dan efektivitas pengendalian internal yang ada sehingga dapat membantu

OPD dalam pencapaian tujuan serta inspektorat mengevaluasi program dan kegiatan operasi apakah telah berfungsi sebagaimana mestinya dan memberi hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan (Yusmalizar, 2014).

Peran inspektorat sebagai katalis memiliki rata-rata sebesar 3,893. Hal ini didukung dengan peran sebagai katalis dengan indikator yang memiliki nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,200, hal ini berarti bahwa auditor setuju jika inspektorat sebagai katalis memiliki peran utama yaitu melakukan evaluasi bersama auditee mengenai laporan keuangan yang telah di review. Hasil ini sejalan dengan Kusumayadi (2012), yang mengemukakan bahwa peran inspektorat. Seperti yang diungkapkan satu auditor menyatakan bahwa:

*”menurut saya begini mbak, inspektorat berperan sebagai katalis terutama inspektorat melakukan evaluasi, observasi dan membantu serta mengarahkan setiap OPD dalam menyusun pencatatan keuangan atau laporan keuangan yang sesuai dengan rencana anggaran dan realisasi anggaran. Selain itu menurut saya, peran internal auditor sebagai katalis berkaitan dengan quality assurance, sehingga internal auditor diharapkan dapat membimbing manajemen dalam mengenali risiko-risiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi”*

Berdasarkan pendapat tersebut peranan auditor internal sebagai katalis terutama dalam berperan dengan *Quality assurance* bertujuan untuk meyakinkan bahwa proses kegiatan yang dijalankan dalam tiap OPD telah menghasilkan kegiatan

OPD yang dapat memenuhi kebutuhan organisasi maupun masyarakat. Dalam peran katalis, internal auditor bertindak sebagai fasilitator dan *agent of change*. *Impact* dari peran katalis bersifat jangka panjang, karena *focus* katalis adalah nilai jangka panjang (*longterm values*) dari organisasi, terutama berkaitan dengan tujuan organisasi yang dapat memenuhi kepuasan bagi masyarakat (Kusumayadi 2012).

Seperti yang diungkapkan Suroso (2009). Auditor internal sebagai katalisator terlibat aktif dalam melakukan penilaian risiko yang terdapat dalam proses bisnis organisasi. Auditor internal memerlukan sikap proaktif dalam mengenali risiko-risiko yang dihadapi atau mungkin dihadapi manajemen dalam pencapaian tujuan organisasi. Hal ini juga didukung dengan hasil statistik deskriptif, peran utama dari inspektorat sebagai katalis adalah inspektorat terlibat dalam perencanaan serta pembuatan keputusan strategis di setiap OPD, inspektorat terlibat dalam perencanaan serta pembuatan keputusan strategis di setiap OPD, inspektorat mengarahkan pelaksanaan kualitas manajemen agar sesuai dengan yang direncanakan, inspektorat menentukan efektivitas sistem organisasi yang berkaitan dengan pencatatan keuangan internal dan pengawasan kerja dan inspektorat menentukan kelayakan sistem organisasi yang berkaitan dengan pencatatan keuangan internal dan pengawasan kerja.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan: Peran Inspektorat sebagai watchdog terutama mengawasi kepatuhan auditee

terhadap standar operasional yang ada, melakukan inspeksi terhadap kepatuhan karyawan pada peraturan dan kebijakan yang ditetapkan dan melakukan penghitungan ulang terhadap catatan angka-angka dan transaksi-transaksi yang terdapat dalam laporan keuangan. Peran Inspektorat sebagai konsultan terutama menganalisis semua tindakan pegawai OPD agar tidak bertentangan dengan kebijakan, standar, prosedur, hukum, dan regulasi yang berlaku dan mengevaluasi program dan kegiatan operasi apakah telah berfungsi sebagaimana mestinya dan memberi hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Peran Inspektorat sebagai katalis terutama melakukan evaluasi bersama auditee mengenai laporan keuangan yang telah di review.

### **Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian, indikator peran inspektorat sebagai watchdog dengan nilai rata-rata terendah adalah inspektorat meninjau kesesuaian pelaksanaan program terhadap program yang direncanakan. Oleh sebab itu bagi inspektorat lebih meninjau kesesuaian pelaksanaan program terhadap program yang direncanakan oleh OPD. Indikator peran inspektorat sebagai konsultan dengan nilai rata-rata terendah adalah inspektorat mengevaluasi kesesuaian aktivitas dengan hukum, regulasi, dan standar yang berlaku. Oleh sebab itu bagi inspektorat lebih mengevaluasi kesesuaian aktivitas dengan hukum, regulasi, dan standar yang berlaku. Sedangkan indikator peran inspektorat sebagai katalis dengan nilai rata-rata terendah adalah inspektorat membantu meningkatkan produktivitas setiap OPD. Oleh sebab itu bagi

inspektorat lebih membantu meningkatkan produktivitas setiap OPD

### Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah, peneliti hanya meneliti persepsi peran inspektorat sebagai *watchdog*, *konsultan* dan *katalis*, dengan responden pegawai inspektorat yang memiliki jabatan pekerjaan sebagai auditor dan belum meneliti responden dari masing-masing OPD di Salatiga.

### Saran

Saran penelitian ini bagi auditor atau inspektorat untuk lebih meninjau kesesuaian pelaksanaan program terhadap program yang direncanakan di setiap OPD, inspektorat lebih mengevaluasi kesesuaian aktivitas dengan hukum, regulasi, dan standar yang berlaku dan inspektorat untuk lebih membantu meningkatkan produktivitas setiap OPD. Selain itu peneliti yang akan datang diharapkan untuk menambahkan responden pada tiap OPD, sehingga secara teori dapat mendapatkan responden minimal 30 orang untuk data kuantitatif.

### DAFTAR PUSTAKA

- Astuty. 2017. *Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan peran inspektorat daerah sebagai konsultan dan katalis*, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Vol.7. 53-65.
- Khoiro, H., Marsyad, & K. Hidayati. 2017. Peranan Audit Internal terhadap Kepatuhan Manajemen Perusahaan pada PT. Hero Supermarket Tbk Waru Sidoarjo. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(3), 199–212.
- Kusmayadi, D. 2012. Determinasi Audit Internal Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Serta Implikasinya Pada Kinerja Bank. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol. 16(2), h: 147-156.
- Naryanto, L. J., Studi, P., Fakultas, A., Dan, E., ... Rahadhitya, R. 2017. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor pemerintah. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 18(3), 1–12.
- Rahayu, S. Yudi. Rahayu, 2007. Strategi Penerapan Paradigma Baru Dalam Peran Auditor Internal Organisasi Pemerintah *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Vol. 7 No. 2/ September 2007*. 7(2), 139–160.
- Saerang, D. P. E., Karamoy, H., & Siwy, M. I. 2008. *Pelaksanaan Fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk Menunjang Tingkat Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado*, *urnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Vol. 11 No. 2/ September 2008*. 7(2), 121–134.
- Sanjaya, L. 2016. Optimalisasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Sidoarjo. *JKMP, Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(1), 35. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v3i1.179>
- Supriyanto. 2009. Pergeseran Paradigma tentang Fungsi Audit internal Serta Kaitannya dengan Aspek Teknologi Informasi dalam Organisasi Perguruan

- Tinggi, *Jurnal Universitas Widyatama*, Vol 7, 4–10.
- Suroso. 2009.(Kedudukan dan Fungsi Audit Internal dalam Perusahaan), *Jurnal Ilmiah Abadi Ilmu*, Vol 2, 230–235.
- Susilawati. (2014).Pengaruh Profesionalisme dan Independensi Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit: Studi Pada Inspektorat Propinsi Jawa Barat, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 13. 190–201.
- Tampubolon. 2005. In *Risk and Systems-Based Internal Audit*. Jakarta: PT Gramedia.
- Tusek, Boris dan Barisic Ivana. (2016). Internal Audit Activities as a Support to Governance Processes. *International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship*. pp: 168-183
- Yusmalizar. 2014. Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 2(3), h: 1-23.
- Yusniyar, Darwanis, dan Syukriy Abdullah. 2016. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Intern Terhadap Good Governance dan Dampaknya Pada Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada SKPA Pemerintah Aceh). *Jurnal Magister Akuntansi*. Vol. 5(2), h: 100-115.
- Zeyn, E. 2011. Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 1(1), h: 21-37